

**PENGEMBANGAN WILAYAH  
DALAM PERSPEKTIF POTENSI SUMBER DAYA**

**MARIATUL KIPTIAH**

*Abstrak*

*Indonesia dengan segala potensi yang dimiliki sebagai modal pembangunan, semestinya mampu menjadi negara maju dan sejajar dengan negara-negara lainnya. Namun pada kenyataannya potensi alam yang meliputi kekayaan alam di darat dan di laut belum mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya.*

*Upaya pemerintah dalam memerangi kemiskinan dari tahun ke tahun terus meningkat, hal ini terlihat dari dana yang di kucurkan untuk program pengentasan kemiskinan. Kebijakan yang “ pro-kaum miskin” sangat di perlukan agar pertumbuhan ekonomi mempunyai dampak positif yang berarti bagi pengurangan kemiskinan, terutama kebijakan yang produktif seperti perluasan akses bagi semua orang pada bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, peningkatan kesempatan kerja serta pembangunan sektor pertanian dan ekonomi pedesaan.*

*Penelitian ini lebih difokuskan pada eksperimental sehingga mampu menciptakan fenomena pada kondisi tertentu yang mengakibatkan adanya hubungan sebab akibat dari kondisi yang diteliti dengan menggunakan model penelitian kuantitatif. Adanya pembangunan dan pengembangan wilayah yang seimbang di seluruh wilayah Indonesia tampaknya masih menjadi wacana, Kawasan Indonesia Timur (KTI) sampai sekarang masih jauh ketinggalan di bandingkan dengan pembangunan yang terjadi di Kawasan Barat Indonesia (KBI). Kesenjangan antar wilayah ini dapat dilihat dari beberapa dimensi, yaitu sosial ekonomi dan layanan publik yang berimplikasi pada kesejahteraan masyarakatnya, angka kemiskinan, akses layanan kesehatan dan pendidikan, kemudian dimensi wilayah yang tumbuh. Pembangunan atau pengembangan wilayah yang dilaksanakan tentunya ingin mencapai keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumberdaya, merestrukturkan dan menyeimbangkan pembangunan nasional/wilayah/regional dalam satu kesatuan wilayah nasional, meningkatkan keserasian antar kawasan, dan keterpaduan antar sektor pembangunan dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itu diperlukan keseimbangan regional dalam melaksanakan pembangunan atau pengembangan wilayah sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati merata di seluruh wilayah Indonesia dan kesenjangan antar daerah dapat dikurangi.\*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Kegiatan pengembangan wilayah tidak terlepas dari perencanaan pembangunan yang di dalamnya terdapat proses perumusan serta penyusunan rencana-rencana pembangunan yang berada pada suatu daerah atau wilayah. Perumusan tersebut disesuaikan dengan visi, misi tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam proses pembangunan.

Perencana pembangunan wilayah pada dasarnya bertugas untuk merancang keseluruhan proses perencanaan yang akan dilaksanakan dalam rangka melaksanakan pembangunan wilayah yaitu dengan cara mengenali potensi dan masalah, mengetahui profil wilayah, memahami berbagai kebijakan pembangunan yang ada sampai pada kultur budaya masyarakat dan sistem ekonomi, politik yang berkembang<sup>1</sup>. Sehingga dengan adanya perencanaan pembangunan dimaksudkan untuk memperoleh sesuatu dalam waktu yang akan datang dengan usaha yang efektif dalam pencapaiannya<sup>2</sup>. Oleh karena itu, sebuah perencanaan dapat dilihat dari baik buruknya perencanaan yang ditetapkan sehingga membawa pengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan pembangunan daerah itu sendiri.

Indonesia memiliki potensi keanekaragaman sumberdaya alam yang sangat tinggi, akan tetapi hal tersebut juga diikuti dengan ancaman kepunahan keanekaragaman sumberdaya itu sendiri. Indonesia sangatlah kaya akan berbagai sumber daya alam, termasuk keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya.

Sumber daya alam yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia tersebut disadari suatu ketika akan habis dan punah jika pengelolaannya dilakukan secara tidak lestari dan berkelanjutan. Ancaman kepunahan memang disadari sebagai suatu hal yang wajar karena faktor perubahan alam yang antara lain perubahan iklim global, akan tetapi kepunahan yang melesat cepat bukanlah suatu hal yang dapat dianggap wajar. Sebagai contoh penyebab utama kepunahan sumberdaya tumbuhan dan satwa di antaranya adalah kehilangan, kerusakan, serta terfragmentasinya habitat tempat hidup, pemanfaatan secara berlebihan dan perburuan dan perdagangan ilegal. Hilang dan rusaknya habitat satwa disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia, di antaranya konversi hutan alam untuk perkebunan dan tanaman industri sebagai tuntutan pembangunan, pembalakan liar (illegal logging) dan kebakaran hutan.

---

<sup>1</sup>Lihat Riyadi & Deddy Supriady Bratakusuma, 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah; strategi mengenali potensi dalam mewujudkan otonomi daerah*. (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta).

<sup>2</sup> Lihat Soewamohandayaningrat, 1980. *Pengantar Studi Ilmu administrasi dan Manajemen*. (PT. Gunung Agung, Jakarta).

Kesenjangan yang terjadi di dalam pengembangan wilayah di Indonesia dapat menyebabkan kesenjangan wilayah, contoh antara pulau Jawa dan Kalimantan yang sangat berbeda pertumbuhan wilayahnya, hal ini dapat membawa dampak pada disparitas ekonomi dan mengganggu stabilitas sosial budaya masyarakat.

Di dalam pengembangan suatu wilayah sangat diperlukan adanya strategi yang jitu dan dinamis, untuk mencapai hal itu sangat diperlukan juga strategi optimalisasi sumber daya seperti data, software dan hardware serta sumber daya manusia yang unggul dibidangnya. Penerapan sistem pengembangan wilayah secara konseptual lebih mudah dipahami dan dikaji secara mendalam akan tetapi hal ini belum dapat dilaksanakan dengan mudah pada kenyataannya, hal ini disebabkan karena sumber daya yang terbatas dan sumber daya yang kurang dapat dioptimalisasikan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan model penelitian kuantitatif dengan melakukan observasi terhadap wilayah penelitian disertai dengan kajian pustaka yang menambah khazanah kelengkapan dari penelitian. Selain itu, penelitian ini bersifat eksperimental sehingga mampu menciptakan fenomena pada kondisi tertentu yang mengakibatkan adanya hubungan sebab akibat dari kondisi yang diteliti.

## **PEMBAHASAN**

### **Pembangunan Wilayah dan Kebutuhan akan Sumberdaya**

Mengenai konsep pengenalan wilayah menurut Siagian lebih difokuskan pada empat hal utama, yaitu pemahaman wilayah secara cepat, identifikasi kebijakan pembangunan, profil wilayah dan sumber-sumber keuangan daerah<sup>3</sup>. Permasalahan yang sering dihadapi dalam perencanaan pembangunan adalah adanya ketimpangan dan ketidakmerataan dalam pembangunan. Salah satu penyebabnya adalah investasi yang tidak merata baik dari segi regional maupun sektoral. Adapun upaya yang dapat ditempuh untuk mengurangi ketimpangan dan ketidakmerataan di dalam pembangunan adalah dengan mengetahui berbagai peran sektoral di dalam pembangunan. Peran berbagai sektor inilah yang diharapkan mampu memberikan kontribusi pendapatan bagi pembangunan suatu wilayah<sup>4</sup>. Agar tidak

---

<sup>3</sup> Lihat S.P. Siagian, 1994. *Manajemen Strategik*. (Bumi Aksara, Jakarta).

<sup>4</sup> Lihat Solichin Abdul Wahab, 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. (UMM Press, Malang).

terjadi ketimpangan dan kesenjangan dalam perencanaan wilayah, maka dapat dilihat dari perbedaan tingkat kesejahteraan dan perkembangan ekonomi antar wilayah.

Ketimpangan pembangunan antar wilayah dibatasi oleh pelaksanaan pembangunan pada wilayah-wilayah strategis dan cepat tubuh, dan tertinggal. Kawasan strategis di dalamnya biasa dilakukan pembangunan khusus yang menyangkut bidang ekonomi dengan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut sehingga lebih difokuskan pada kawasan perdagangan bebas, ada juga persoalan dalam menghadapi pembangunan daerah tertinggal dengan persoalan terbatasnya potensi sumber daya alam dan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga pada daerah dengan potensi sumber daya alam yang melimpah seringkali mengalami eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan tidak memberikan pemasukan bagi daerahnya secara optimal.

Selain itu juga terbatasnya ketersediaan infrastruktur terutama akses transportasi yang menghubungkan wilayah tertinggal dengan wilayah maju. Sedangkan untuk wilayah maju, biasanya belum tertatanya perencanaan konsep tata ruang sehingga berdampak pada kurang terpadunya perencanaan tata ruang antar sektor. Adapun langkah-langkah yang harus diambil dalam merumuskan kebijakan pada pembangunan daerah tertinggal yaitu:

1. Adanya penyusunan strategi nasional dalam percepatan pertumbuhan daerah tertinggal.
2. Melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap wilayah tertinggal untuk menajamkan prioritas lokasi pembangunan di wilayah tertinggal.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan pembangunan daerah tertinggal secara berkala, sistematis dan terkoordinasi.
4. Mengupayakan alokasi anggaran kepada daerah tertinggal.

### **Potensi dan Kendala Pemanfaatan Sumberdaya untuk Pengembangan Wilayah**

Pembangunan yang cenderung berusaha menggali potensi sumberdaya secara maksimal banyak menimbulkan permasalahan lingkungan sehingga konsep pembangunan berwawasan lingkungan terabaikan. Pembangunan bukannya hanya milik satu atau dua generasi saja. Kekayaan sumberdaya alam yang dimiliki haruslah dikelola dengan baik agar menjadi sumber penghidupan bagi generasi-generasi berikutnya. Dalam hal ini prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan menjadi keharusan diterapkan secara sistematis dan konsisten.

Inti dari pembangunan yang berkelanjutan dimana di dalamnya ada empat sumberdaya yang harus diperhitungkan, Kuswartoyo (1999) antara lain:

1. Sumberdaya buatan (seperti pabrik, infrastruktur);

2. Sumberdaya alam;
3. Sumberdaya manusia; dan
4. Sumberdaya sosial.

Dari keempat sumberdaya tersebut sumberdaya alam adalah sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui walaupun bisa akan memakan rentang waktu yang sangat panjang, sehingga muncul konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan sebagai salah satu solusi untuk tetap mempertahankan sumberdaya alam tadi. Konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan memang merupakan langkah jitu untuk dapat memberdayakan sumber alam supaya dapat dikelola dengan baik dan efisien, akan tetapi dalam prakteknya banyak terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh pembuat kebijakan. Dimana pembangunan yang tadinya ditujukan untuk kemakmuran masyarakat banyak, sebaliknya malah mengakibatkan masalah bagi masyarakat, sehingga bukan kemakmuran yang dicapai tetapi masalah baru yang dituai. Banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang dibuat untuk meningkatkan pembangunan baik fisik maupun non fisik berujung pada masalah lingkungan seperti hilangnya ekosistem sebuah kawasan, beralihnya fungsi lahan, yang semuanya mengakibatkan dampak lingkungan dan sosial yang sangat terasa bagi masyarakat lapisan bawah yang bersentuhan langsung dengan alam sekitarnya (Suhubdy, 1991).

Dampak yang terjadi dapat diminimalisir apabila pemerintah daerah tersebut seperti instansi yang menangani Bappeda, Dinas Pertambangan, Dinas Perkebunan dan Kehutanan serta Badan Lingkungan Hidup dan instansi-instansi terkait lainnya dapat saling berkoordinasi dalam menjalankan peran dan fungsinya masing-masing, dimana setiap kebijakan yang dibuat harus tetap mengacu kepada Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang ada (Suparmoko, 1999).

### **Pertentangan Kepentingan antara Konservasi Sumberdaya dan Pengembangan Wilayah**

Pembangunan pada dasarnya peningkatan manfaat sumber daya dan peningkatan pemenuhan kebutuhan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Pembangunan yang demikian merupakan usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Kebijakan pembangunan merupakan rumusan dari kesepakatan atau kompromi kepentingan atau harapan seluruh stakeholder yang diwujudkan dalam suatu keputusan atau peraturan. Hal ini berarti seluruh stakeholder dituntut memiliki kesamaan

pandangan, setidaknya tentang isu-isu penting yang ingin ditangkap dan dioperasikan (Sugiharto, 2006).

Kepentingan kegiatan pengembangan wilayah dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia kadang menjadi suatu hal yang bertentangan dengan kebijakan konservasi wilayah tersebut. Seringkali dalam mengatur pengelolaan sumber daya alam tidak tercermin kepentingan seluruh komponen masyarakat Indonesia. Misalnya, kenyataan bahwa kawasan yang luas diberikan hak pengelolaannya kepada perusahaan tanpa mempertimbangkan keberadaan masyarakat di kawasan tersebut. Sebaliknya, pengakuan hak kelola (atau milik) kepada masyarakat untuk kawasan yang kecil sangat rumit dan sulit (Moeliono, 2010).

Seiring dengan penambahan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi maka tekanan terhadap sumber daya alam menjadi semakin besar, karena tingkat kebutuhan dan kepentingan terhadap sumber daya alam juga semakin tinggi. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kenyataan betapa pembukaan hutan, kegiatan pertambangan dan eksploitasi sumber daya alam lainnya dari tahun ke tahun semakin besar. Dengan demikian tentunya kawasan-kawasan eksploitasi tersebut kian terancam habis, sementara suksesi sumber daya alam yang dapat diperbaharui yang telah dieksploitasi membutuhkan waktu lama untuk dapat diperbaharui kembali.

Sementara itu dalam rangka perlindungan, berbagai kawasan kemudian ditetapkan sebagai kawasan lindung ataupun kawasan konservasi seperti hutan lindung, kawasan bergambut, kawasan resapan air, sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, kawasan sekitar mata air, kawasan suaka alam (termasuk, cagar alam), kawasan suaka alam laut dan lainnya, mangrove, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, kawasan rawan bencana alam.

Kebijakan konservasi sebagai bagian integral dari pembangunan berkelanjutan pada saat ini masih menghadapi berbagai tantangan yang sangat berat serta masalah yang kompleks dan saling terkait (Setyowati, 2008). Tata kelola konservasi SDA selama ini terjadi ketidakjelasan kewenangan dan tanggung jawab di antara instansi pemerintah terkait. Tanggung jawab sebuah institusi pengelola konservasi SDA juga sering tidak sejalan dengan kapasitas organisasi yang dimiliki. Kemampuan kelembagaan ini juga terus diuji oleh kebutuhan yang terus berubah dan kegagalan kelembagaan tersebut dalam menjalankan tanggung jawab mereka. Pemerintah sering membuat keputusan mengeksploitasi sumberdaya alam (SDA) dengan mengabaikan hak-hak masyarakat. Kelemahan lain adalah kebijakan dan peraturan perundang-undangan pengelolaan dan konservasi SDA selama ini masih kentalnya orientasi sektoral. Setiap instansi sektoral atau sektor hanya memikirkan bidang tugas dan

kepentingannya tanpa melihat adanya peluang koordinasi, komunikasi atau bahkan kerjasama bagi terwujudnya pengelolaan SDA yang lebih efisien, efektif dan berkelanjutan. Dengan kata lain, masih kuatnya ego sektoral telah menghambat terjalannya koordinasi dan kerjasama dalam pengelolaan SDA secara berkelanjutan. Pertambangan merupakan salah satu contoh dianggap bertentangan dengan kegiatan konservasi, tetapi tidak bisa dipisahkan pada realita dan kebijakannya. Kebijakan tambang selalu berupaya mengintervensi pengaturan kawasan konservasi.

Implikasi permasalahan pemerintahan menegaskan adanya persoalan kebijakan pengelolaan konservasi sumber daya alam (SDA) selama ini. Persoalan kewenangan dan tanggung jawab dalam konteks konservasi SDA berkaitan dengan perspektif publik. Demikian pula ketiadaan partisipasi, konsultasi dan koordinasi, sehingga pengelolaan dan konservasi SDA berjalan tidak efektif. Banyak kritik yang muncul terhadap keseriusan pemerintah selama ini dalam mengelola kawasan konservasi. Hal ini disebabkan karena berbagai kebijakan dan peraturan Perundang-undangan yang ada justru memberi legitimasi eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran, sementara upaya perlindungan dan konservasi bukanlah merupakan prioritas yang setara. Oleh karenanya ada kesan bahwa kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi seolah aturan pelengkap, dan bukan memainkan peran sebagaimana misi sebenarnya.

Pemerintah kerap menyebut berbagai hambatan yang dihadapi seperti luasnya cakupan dan sebaran kawasan konservasi dan terbatasnya sumber daya manusia maupun dana, sehingga pengelolaan kawasan konservasi yang dilakukan selama ini berjalan agak tersendat. Namun jika dilihat persoalan mendasar lainnya, adalah kuatnya ego sektoral, baik di dalam kementerian yang membawahi pengelolaan kawasan konservasi sendiri maupun dari kementerian lain yang berkepentingan untuk mengeksploitasi kawasan konservasi (Sembiring, 1998).

### **Strategi Optimalisasi Sumberdaya untuk Pengembangan Wilayah**

Menurut Healey dalam Djakapermana (2010), menjelaskan tentang *New Strategic Spatial Planning in Europe*, suatu bahasan pengelolaan ruang dan tempat yang optimal dalam jurnal Internasional Urban and Regional Research. Ada beberapa alasan perlunya langkah operasionalisasi rencana spasial yang sebelumnya rencana spasial tersebut telah disusun oleh masyarakat Eropa dalam bentuk *Europe Spatial Development Perspective*. Rencana spasial tersebut masih sulit untuk dilaksanakan dan bahkan menjadi perdebatan para Planner Eropa.

Alasannya masih diperlukan arahan kebijakan dan strategi dalam pelaksanaan pembangunan tersebut antara lain :

1. Adanya persoalan koordinasi kebijakan publik khususnya dengan pemerintahan lokal,
2. Mencari cara bagaimana membuat wilayah perkotaan lebih ekonomis dan kompetitif dengan mengembangkan aset basenya,
3. Perlu menetapkan bentuk kebutuhan ruang sumberdaya alam yang optimal untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan bagaimana mengatasi ketidakseimbangan distribusi akses penduduk lokal untuk berhubungan dengan wilayah perkotaan.

Menurut Djakapermana (2010), menjelaskan bahwa berdasarkan kajian geologi tata lingkungan wilayah Kalimantan mengandung potensi sumberdaya mineral logam maupun non logam namun pemanfaatannya belum begitu optimal sebagaimana yang diharapkan begitu juga dalam penggunaan lahan. Oleh sebab itu peningkatan strategi optimalisasi sumberdaya dalam peningkatan wilayah, di Indonesia perlu dikembangkan khususnya untuk daerah Kalimantan.

Sumberdaya yang dibutuhkan antara lain yaitu data, software dan hardware serta sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam tata ruang dan wilayah. Berbagai software telah dikembangkan untuk memantau proses berfikir sistem dan simulasi sistem dinamika dan aplikasi software tersebut membutuhkan kemampuan sumber daya manusia yang terampil dan ahli. Menurut Sterman (2002), penerapan model-model mental dalam pengambilan keputusan adalah basis dari tujuan pemodalan komputer yang sesungguhnya.

## **KESIMPULAN**

1. Potensi sumber daya alam sangat berpengaruh terhadap pembangunan wilayah. Kebijakan yang mendukung wilayah dengan potensi sumber daya alam yang terbatas harus diutamakan.
2. Pembangunan pada satu periode dihadapkan akan dapat menunjang pembangunan pada tahap berikut yang semakin komplek. Sehingga penggunaan potensi sumber daya yang dimiliki secara berencana dengan menentukan suatu skala prioritas kelola dan selalu memperhatikan karakteristik sumber daya alam.
3. Kegiatan pengembangan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah sering kali bertentangan dengan kegiatan konservasi sumberdaya alam. Pada kenyataannya konservasi harus dikalahkan dengan kegiatan pengembangan wilayah.



4. Strategi optimalisasi sumberdaya untuk pengembangan wilayah sangat memerlukan data, software dan hardware serta sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam tata ruang dan wilayah.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Djakapermana, 2010, *Pengembangan Wilayah Melalui Pendekatan Kesisteman*, IPB Press, Bogor.
- Kuswartoyo, Thuk, 1999, *Membuat Pembangunan Berlanjut*, Jakarta.
- Moeliono, Moira, dkk, 2010, *Meretas kebuntuan*, CIFOR, Bogor.
- Riyadi, Deddy Supriady Bratakusuma, 2004, *Perencanaan Pembangunan Daerah; Strategi Mengenal Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sembiring, Sulaiman, dkk, 1998, *Kajian Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia*, ICEL, Jakarta.
- Setyowati, Abidah, dkk, 2008, *Konservasi Indonesia Sebuah Potret Pengelolaan & Kebijakan*, Pokja Kebijakan Konservasi, Jakarta.
- Siagian, S.P, 1994, *Manajemen Stratejik*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Soewarnohandayaningrat, 1980, *Pengantar Studi Ilmu administrasi dan Manajemen*, PT. Gunung Agung, Jakarta.
- Sugiharto, 2006, *Pembangunan dan Pengembangan Wilayah*, USU Press, Medan.
- Suhubdy, Yasin, dkk, 1991, *Sistem Pengelolaan Sumber Daya Pertanian Berwawasan Lingkungan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Sterman, JD, 2002, *System Dynamics Modeling : Tools for learning in complex world*, IEEE Enginrering Manajement Review.
- Suparmoko, 1999, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, PT. BPFE, Yogyakarta.
- Wahab, Solichin Abdul, 2008, *Analisis Kebijakan Publik*, UMM Press, Malang.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.42/MENHUT-II/2009 tentang Pola Umum, Kriteria dan Standar Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu.